BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 230 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cikancung untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Cikancung, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cikancung untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Cikancung untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Cikancung;
(2) Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Cikancung tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cikancung;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Cikancung dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Cikancung;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Cikancung yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Cikancung digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Cikancung selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Cikancung meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Cikancung sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Cikancung dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Cikancung.

Pasal 7

(1) Kecamatan Cikancung membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Cikancung disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Cikancung tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Cikancung melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cikancung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cikancung terhadap pelaksanaan dan hasil Kecamatan Cikancung.

(3) Camat Cikancung menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Cikancung.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Cikancung dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cikancung beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Cikancung tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 230

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 230 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
CIKANCUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

P E N D A H U L U AN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan yang memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah,

maupun tahunan, dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada tujuan (*goals*), tetapi juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh kalangan. Adapun melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, rencana pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi daftar usulan pada Musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis

internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Dalam rangka memberikan acuan terhadap terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) yang memuat Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis PD. Rencana Kerja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sebagai salah satu PD di Kabupaten Bandung, telah Menyusun Rencana Kerja satu tahun ke depan (Tahun Anggaran 2026) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Rencana Kerja tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan

kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. yang merupakan organisasi perangkat daerah, perlu bersinergi dengan VISI dan MISI yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini dimaksudkan agar VISI dan MISI Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Cikancung.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cikancung

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara teadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakanag

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung, dan keterkaitan antara antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Cikancung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Cikancung

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Cikancung, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat informasi tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalann yang seharusnya pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cikancung

Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan menganai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini di kemukakan rumusan rencana kerja beserta rancangan pendanaan Kecamatan Cikancung.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cikancung

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2026 dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2021 - 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2026. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Cikancung melaksanakan 6 (Enam) program dengan 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.671.911.242,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD), Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja baru mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 92,93 % atau Rp. 6.200.391.888,00 Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 telah berhasil memberikan realisasi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target yang ditentukan, dengan demikian tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	70	76,80	109,71%
		2. Persentase BMD dalam Kondisi baik	%	78	81,62	104,64%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Nilai	78	82,50	105,77%
		Persentase Desa yang beradministrasi baik	%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	3	3	100 %
Rata-rata capaian						105,16

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisai program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersebut adalah sebagai berikut :

Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian	Menunjang /
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%	tdk
	PENDAPATAN								
1	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA DAERAH	6.671.911.242	6.200.391.888	92,93					Menunjang
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.856.937.438	5.436.707.588	92,83					Menunjang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.150.000	40.208.000	80,18					Menunjang
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.150.000	8.301.000	90,72	Dokumen	1	1	100	Menunjang
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.670.000	73,40	Dokumen	1	1	100	Menunjang
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	3.757.000	62,62	Dokumen	1	1	100	Menunjang

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	24.480.000	81,60	Dokumen	1	1	100	Menunjang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.059.605.438	4.702.629.917	92,94					Menunjang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.043.605.438	4.690.529.917	93	Bulan	14	14	100	Menunjang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.550.000	73,40	Dokumen	1	1	100	Menunjang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	6.910.000	86,38	Dokumen	1	1	100	Menunjang
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	2.640.000	52,80	Dokumen	1	1	100	Menunjang
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perrangkat Daerah	5.000.000	2.560.000	51,20					Menunjang
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	2.560.000	51,20	Dokumen	1	1	100	Menunjang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.121.000	131.260.600	88,62					Menunjang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.998.500	99,95	Unit	34	34	100	Menunjang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.113.000	80.167.900	96,46	Unit	4	4	100	Menunjang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.998.400	99,97	Buah	6	6	100	Menunjang
	Penyediaan Bahan Logistik	7.500.000	7.493.000	99,91	HOK	12	12	100	Menunjang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	2.328.000	38,80	Buah	5	5	100	Menunjang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.728.000	23.114.800	89,84	Eksemplar	87	87	100	Menunjang
	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000	3.000.000	50	HOK	12	12	100	Menunjang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.780.000	7.160.000	60,78	HOK	12	12	100	Menunjang
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.122.550	242.380.331	94,27					Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.122.500	25.542.000	68,80	Unit	7	7	100	Menunjang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.290.000	92,90	Unit	5	5	100	Menunjang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000	207.548.331	98,83	Unit	1	1	100	Menunjang

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.983.500	291.853.940	93,85					Menunjang
	Penyediaan Jasa Surat	3.000.000	1.010.000	33,67	Bulan	12	12	100	Menunjang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.050.000	29.103.300	72,75	Bulan	12	12	100	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.933.500	261.740.640	97,69	Bulan	14	14	100	Menunjang
II	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	395.222.550	365.666.400	92,52					Menunjang
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.943.200	9.554.200	96,09					Menunjang
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	9.943.200	9.554.200	96,09	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.839.800	16.304.000	91,39					Menunjang
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.839.800	16.304.000	91,39	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	17.464.500	17.183.000	98,39					Menunjang
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	17.464.500	17.183.000	98,39	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	349.975.050	322.625.200	92,19					Menunjang
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	349.975.050	322.625.200	92,19	Kegiatan	4	4	100	Menunjang
III	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	149.750.300	145.680.100	97,28					Menunjang
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99.685.400	96.632.500	96,94					Menunjang
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.685.400	96.632.500	96,94	Kegiatan	2	2	100	Menunjang
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50.064.900	49.047.600	97,97					Menunjang
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.971.600	13.834.200	99,02	Kegiatan	1	1	100	Menunjang

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.957.400	20.284.200	96,79	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.135.900	14.929.200	98,63	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.910.000	41.110.000	89,54					Menunjang
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaan Ketentraman dan Ketertiban	15.000.000	15.000.000	100					Menunjang
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	15.000.000	100	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.910.000	26.110.000	84,47					Menunjang
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.910.000	26.110.000	84,47	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.282.107	62.355.400	90					Menunjang
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.282.107	62.355.400	90					Menunjang
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	37.732.107	32.005.400	84,82	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.550.000	30.350.000	96,20	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
VI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.742.320	37.327.800	98,90					Menunjang
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	154.808.847	148.872.400	96,17					Menunjang
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	74.992.847	74.288.400	99,06	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
	Failitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.816.000	23.850.000	96,11	Kegiatan	1	1	100	Menunjang
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	30.000.000	28.177.000	93,92	Kegiatan	1	1	100	Menunjang

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesanaan di Wilayah Kecamatan	25.000.000	22.557.000	90,23	Kegiatan	1	1	100	Menunjang

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

   Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapakali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikancung sehingga realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Capaian Kinerja di Kecamatan Cikancung yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

   a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.

   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik

   c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 khususnya Kecamatan Cikancung berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun Anggaran 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian.

Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2026 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cikancung s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Kabupaten Bandung

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2026			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1	16.00	0	0	0	KECAMATAN									
7	1	16.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai BMD	- 71 - 80	- 75,96 - 77	- 70 - 78	- 76,80 - 81,62	- 109,71% - 104,64%	- 70 - 78	- 76,80 - 78	98%
7	1	16.00	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500%	100%	100%	50%	100%	100%	350%	80%
7	1	16.00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	80%

7	1	16.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	80%
7	1	16.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	60%
7	1	16.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500%	100%	100%	50%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan	25 Orang/ 12 Bulan	25 Orang/ 12 Bulan	25 Orang/ 6 Bulan	100%	25 Orang/ 12 Bulan	75 Orang/ 12 Bulan	80%
7	1	16.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	80%
7	1	16.00	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%

7	1	16.00	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
1	5	.5..00	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	5	.5..00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	-	0	0%
1	5	.5..00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0 OK	0%
7	1	16.00	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	10 Paket	100%
7	1	16.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	-	4 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	80%
7	1	16.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Peket	2 Paket	0 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%

7	1	16.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	16.00	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			100%		2 Unit	80%
7	1	16.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%
7	1	16.00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	4 Unit			100%		4 Unit	80%
7	1	16.00	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	80%
7	1	16.00	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	7 unit	9 unit	2 unit	100%	9 unit	23 unit	80%

7	1	16.00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit				100%			0%
7	1	16.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	5 unit	5 unit	2 unit	100%	5 unit	15 unit	80%
7	1	16.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	0 unit	100%	1 unit	3 unit	80%
7	1	16.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	80,00	77,00	78,00	84,12	100%	78,00	78,00	80%
7	1	31.00	2	2,01	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80%
7	1	31.00	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	80%
7	1	31.00	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen				100%			0%
7	1	31.00	2	2,02	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	31.00	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
7	1	31.00	2	2,03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%

7	1	31.00	2	2,03	1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	80%
7	1	16.00	2	2,04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100%	0 dokumen	0 dokumen	0%
7	1	16.00	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	80%
7	1	16.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	3	2,01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga	5 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	100%	0 Lembaga	5 Lembaga	80%
7	1	16.00	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1 Laporan	0,5 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	80%
7	1	20.00	3	2,03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	20.00	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	0 Lembaga	100%	5 Lembaga	10 Lembaga	80%

7	1	20.00	3	2,03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
7	1	20.00	3	2,03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	80%
7	1	16.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	16.00	4	2,01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	80%
7	1	16.00	4	2,01	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	80%
7	1	16.00	4	2,02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase dalam pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketertiban Umum	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	80%
7	1	16.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	5	2,01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%

7	1	16.00	5	2,01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180 Orang	60 Orang	0 Orang	60 Orang	100%	0 Orang	60 Orang	80%
7	1	16.00	5	2,01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	425 Orang	85 Orang	85 Orang	0 Orang	0%	85 Orang	255 Orang	80%
7	1	16.00	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	80%
7	1	16.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	6	2,01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
7	1	16.00	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20%	1 dokumen	2 dokumen	80%
7	1	16.00	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20%	1 dokumen	3 dokumen	80%
7	1	16.00	6	2,01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen							0%
7	1	16.00	6	2,01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0%

7	1	16.00	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	80%
7	1	16.00	6	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	20%	1 Laporan	2 Laporan	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cikancung sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program kegiatan yang telah dilaksankan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perenccanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan

masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 (TC.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cikancung

Kabupaten Bandung

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2026	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	76	77	78	82,7	82,50	n/a	83	83	Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Persentase BMD dalam Kondisi baik, Nilai IKM dan persentase desa yang beradministrasi baik, serta jumlah desa cepat berkembang merupakan aspek penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, diperlukan komitmen dari seluruh jajaran instansi untuk mencapai kinerja yang optimal.
2	Nilai AKIP	66,5	67	70	77	76,80	n/a	77	77	
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	76%	77%	78%	79%	81,62	n/a	80%	80%	
4	Persentase Desa Beradministrasi Baik	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Jumlah Desa cepat Berkembang	n/a	n/a	3	3	3	n/a	n/a	n/a	

Data Realisasi Tahun 2025 belum tersedia

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Cikancung

Pencapaian Kinerja Kecamatan Cikancung selama tahun 2024 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, Pendapatan Asli Daerah, maupun pembangunan, infrasturktur hasil Musrenbang tahun 2024. Adapun kegiatan yang terealisasi pada tahun 2024 diantaranya, yaitu :

1. Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan pembinaan tiga bulan sekali, kepada aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dengan materi masalah Pemerintahan dan sosial dari semua Seksi di lingkungan Kecamatan Cikancung. Melaksanakan Monitoring ke Desa-desa Hasil monitoring, tersebut antara lain; Kegiatan fisik hasil bantuan-bantuan yang telah dilaksanakan, yang belum disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban Pembangunan fisik yang berasal dari bantuan hasil Musrenbang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
   Dalam bidang Kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP Elektronik (E-KTP), telah dilaksanakan pelayanan Perekaman data wajib E-KTP dan telah terealisasi.

   Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun Anggaran 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, secara serentak dilakukan pengolahan Administrasi Kependudukan, serta Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 2004, yang menetapkan bahwa Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab menetapkan standar penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sehingga dilakukan tertib administrasi kependudukan yang dicirikan oleh adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik dan berlaku bagi penduduk seumur hidup dan tidak tergantikan oleh orang lain. Untuk itu di tiap-tiap kecamatan telah dilaksanakan pelaksanaan program SIAK online, pencetakan KK dan Perekaman Data Biometrik KTP-el. Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, KK, KIA, surat keterangan pindah, dan surat-surat kependudukan lainnya, telah terlayani dengan baik, dan seluruh permohonan telah diproses sesuai SOP yang berlaku.

   Permasalahan-permasalahan yang ada dalam hal penerimaan PBB antara lain : kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB masih kurang, antara lain disebabkan karena objek pajak tidak sesuai dengan nama pemilik, luas objek pajak tidak tidak sesuai dengan jumlah luas yang ada pada surat kepemilikan tanah, tingginya NJOP dan kurangnya respons para pemilik untuk membayar pajak. Hal ini perlu mendapat perbaikan sehingga nama, luas tanah, NJOP dapat disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. dilaksanakan operasi

sisir hingga ke tingkat RW untuk menginventarisir permasalahan yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban melunasi PBB, sehingga setidaknya dapat mendongkrak realisasi PBB, meskipun hasilnya belum menambah realisasi yang signifikan. Disamping itu, rencana ke depan untuk meningkatkan target pendapatan PBB, bagi masyarakat yang akan membuat KTP, KK, KIA, Akta lahir, Akta Kemaian ataupun surat keterangan penduduk lainnya, salah satu syaratnya adalah menunjukkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), sebagai tanda lunas pembayaran PBB bagi masyarakat yang memiliki tanah dan atau bangunan.

2. Pada bidang Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan kegiatan diantaranya, sebagai berikut :
   a. Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana Olah;
   b. Menerima bantuan BLT dan Sembako yang masuk data miskin ekstrem di 9, menrima Penyaluran untuk desa potensi rawan pangan;
   c. Menerima Bantuan Kube Ternak domba diterima oleh Desa Loa, menrima warungan dan Konveksi, menerima bantuan Warungan
   d. Selain itu juga telah melaksanakan Penyaluran Bantuan Sembako Keluarga stunting, Penyaluran OPM Subsidi, Penyaluran bantuan beras Cadangan Pemerintah, Penyaluran Bantuan untuk korban bencana longsor,Kebakaran, Sosialisasi Olah raga prestasi, Penyaluran untuk disabilitas, penyaluran bantuan keluarga resiko stunting dari kemensos, melaksanakan kegiatan PHBN, Melaksanakan Musyawarah pemilihan Ketua LLI Kec.Cikancung, Penylauran bantaun sandang untuk LANSIA, Sosialisasi Lembaga kemasyarakatan desa, Melaksnakanan Monev KUBE ternak Domba.
3. Pada Bidang Pembangunan, telah melaksanakan pembinaan dan monitoring Evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADD, DD, PSPM Raksa Desa, Bangub ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, serta Kegiatan pengelolaan sampah.
4. Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan dan Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

Kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Cikancung selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat, namun demikian masih terdapat beberapa kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban, akan tetapi berhasil ditangani.

Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain :

a. Memelihara, memupuk serta mengawasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pembinaan ke desa di Wilayah Kecamatan Cikancung secara periodik bersama unsur terkait.
b. Meningkatkan pengawasan, dan kesiapsiagaan di setiap Kantor Pemerintahan dan Desa-desa dengan mengintensifkan pelaksanaan Piket, pemberdayaan Siskamling dan pengefektifan Pos Kamling yang telah ada, dan siap siaga terhadap bencana alam.
c. Bekerjasama dengan stakeholder dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
d. Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kapolsek, Koramil, PD, juga Unsur-unsur terkait (masyarakat peduli Bencana) untuk menginventarisir Daerah/Wilayah yang rawan bencana di Desa-desa Se-Wilayah Kecamatan Cikancung.

5. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musdesa) Tahun Anggaran 2025;
   b. Kegiatan Bina Wilayah Tingkat Kabupaten Bandung;
   c. Melaksanakan Lomba Posyandu;
   d. Monitoring dan Pembinaan Posyandu di Wilayah Kecamatan Cikancung;
   e. Kegiatan pembinaan administrasi Dana Desa melalui monitoring dan evaluasi di Desa Se Wilayah Kecamatan Cikancung
   f. Melaksanakan Kegiatan Jambore PKK Tingkat Kabupaten, dan Jambore Perangkat Desa ;

g. Melaksanakan rembug stunting;
h. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan pembagian Insentif Kader Posyandu, Pendistribusian bantuan-bantuan;
i. Mengikuti Pelaksanaan Rembug Bedas.
j. Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023, Kecamatan Cikancung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    1. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
    2. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan social budaya;
    3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkornisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Pemerintah Kecamatan Cikancung mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum Profesional;
b. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
c. Belum Optimalnya Pelayanan kepada Masyarakat;
d. Belum Optimalnya Pengadministrasian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
e. Terjadinya Bencana alam (Banjir, longsor, Kekeringan lahan) di beberapa Wilayah Kecamatan Cikancung;
f. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan pelebaran jalan/ pembangunan jalan tol;
g. Masih Terdapatnya angka stunting, anak yang putus sekolah, serta masyarakat miskin ekstrim di Wilayah Kecamatan Cikancung, belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan UMKM;
h. Pengelolaan sampah belum Optimal;

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana kita ketahui bahwa Visi Kabupaten Bandung adalah *"*Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) , Maju, Dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas". Penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Lebih Bedas : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warka Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan Masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata Provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan : Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan, Memiliki arti yaitu Pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikamti oleh Masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut 5 (Lima) Misi Pembangunan Jangka menegah daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 :
    1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, Kompetitif dan Berahlak serta penguatan Kesetaraan gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;

2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3) Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transfaran dan Akuntabel;
4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5) Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan mempunyai kewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 3 yaitu : *"Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel".*

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Cikancung, meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus rutin dilaksanakan setiap bulan, apabila ada permasalahan dan hambatan semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan

Upaya Penanganan

a. Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap SDM Kecamatan Cikancung dalam hal ini ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan administrasi Kepegawaian;
b. Pelaksanaan Sensus BMD, Pengadaan serta Pemeliharaan Barang aset Daerah, ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Administrasi Umum Perangkat Dearah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
c. Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait Pelayanan Publik yang terdapat pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

d. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala dan berkesinambungan ada pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
e. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Disimpan di sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
f. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan konsulatsi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Cikancung;
g. Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait, pelatihan keterampilan, pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga perekonomian masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi UKM Pengembangan Teknologi Tepat Guna, pencegahan, penanganan Stunting Ada pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
h. Mengadakan Sosialisasi persampahan, pembentukan B2S dan pengelolaan sampah serta koordinasi dan konsultasi secara berkala dan berkesimbungan mengenai persampahan ada pada kegiatan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan pelayanan publik;

5. Tantangan dan Peluang

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya tantangan, baik Internal maupun eksternal, baik yang sudah terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi.

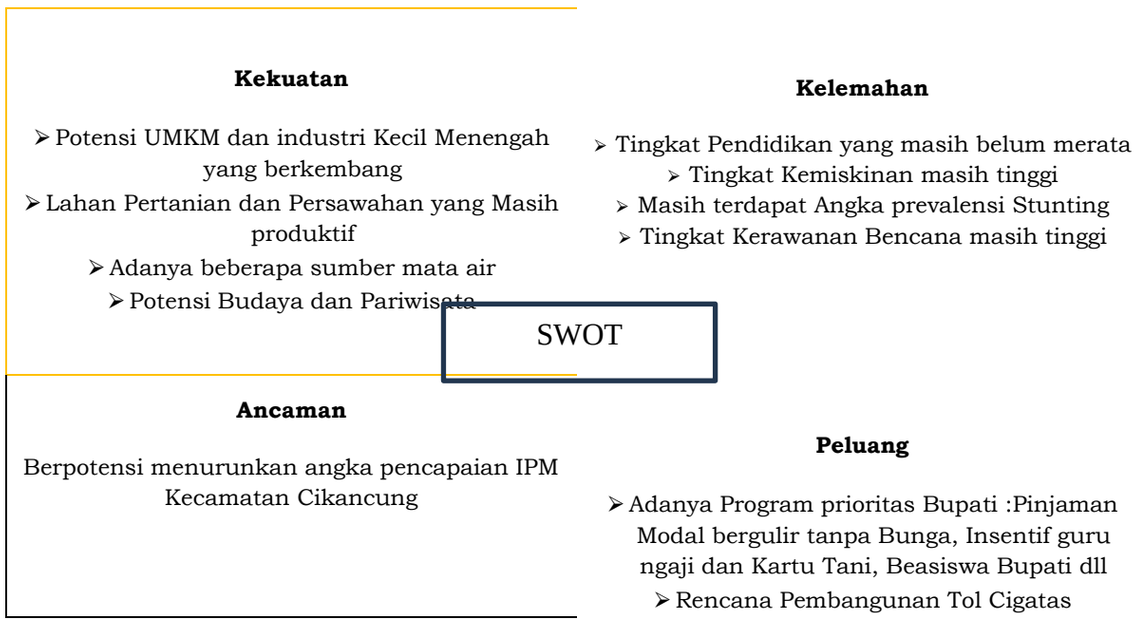
Adapun tantangan tersebut adalah :

a. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan Kecamatan belum maksimal.

b. Kinerja Aparat Desa belum Maksimal dapat dilihat dari belum tertibnya administrasi di tingkat desa
c. Sudah terealisasi pengadaan lahan untuk alun-alun Kecamatan sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lapang belum dilaksanakan .
d. Belum terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
e. Perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban agar teelihara keadaan yang kondusif.

6. Formulasi isu-isu Penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan Kecamatan Cikancung memetakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) berdasarkan pendekatan kewilayahan pada masing-masing wilayah Kecamatan. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Gambar berikut ini menjabarkan kondisi Kecamatan Cikancung sesuai dengan analisis SWOT sebagai dasar untuk penentuan program yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Bandung.



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

gambar 2.1 Analisis SWOT Kewilayah Kecamatan Cikancung

Dari analisis SWOT tersebut menghasilkan rekomendasi untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan menjadi basis perencanaan yang mendukung program yang mendasari Kewilayahan pada tahun 2026 Menindaklanjuti isu strategis yang terdapat di Kecamatan Cikancung, Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Cikancung Kabupaten merencanakan pelaksanaan program kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Upaya untuk Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta ketersediaan sarana dan Prasarana untuk pelayanan Publik;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai Upaya Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik mulai dari sosialisasi, pengkoordinasian sarana dan prasarana pelayanan umum, dan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan, serta Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, termasuk di dalamnya 13 program strategis Bupati;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai Upaya untuk Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Musdes, Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan termasuk di dalamnya PKK, Posyandu, Dasawisma, KL, dan percepatan penanganan/pencegahan stunting, rembug stunting, pengembangan usaha ekonomi, dan Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasias Lembaga kemasyarakatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai Upaya untuk meningkatkan Kerjasama/ sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal dalam Peningkatan wawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Penerapan dan Penegakan Perturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

pencegahan, pelaksanaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban yang ada di Wilayah Kecamatan Cikancung;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, sebagai Upaya untuk meningkatkan Wawasan kebangsaan, dan Cinta Tanah air karena di dalamnya terdapat kegiatan untuk memperingati Hari Bersejarah, dan Hari Besar lainnya;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa, karena di dalamnya terdapat kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di Desa, mulai dari Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, serta Pelaksanaan Pilkades.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dilakukan dengan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Pada tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat perbedaan yang signifikan dikarenakan adanya Perubahan BSO dan kekurangan kebutuhan anggaran sehingga terjadi pergeseran antar sub kegiatan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Adapun Review rancangan awal RKPD Kecamatan Cikancung Tahun 2026 sebagimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahunan

yang menjadi acuan dalam menerapkan program/kegiatan, dapat dilihat pada tabel T-C.31di bawah:

Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan Renja tahun 2026
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

KODE REKENING	RANCANGAN RENJA 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	KECAMATAN				6,082,480,061	KECAMATAN		6.319.411.571,00		6,638,586,524
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	- Nilai IRB - Nilai IMR	71 Point 71 Point	5,360,930,061	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	- Nilai IRB - Nilai IMR	60 Point 70 Point	5,648,934,371
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	71 Point	65,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	77,4 Point	30,400,000
7.01.01.2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,400,000
7.01.01.2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8,500,000
7.01.01.2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,100,000

7.01.01.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,400,000
7.01.01.2.0108	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000
7.01.01.2.0109	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	10,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	5,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,732,930,061	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,948,916,000
7.01.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	4,723,930,061	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	4,939,416,000
7.01.01.2.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000
7.01.01.2.0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000
7.01.01.2.0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1 Dokumen	2,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1 Dokumen	2,500,000

			Prognosis Realisasi Anggaran					Prognosis Realisasi Anggaran		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2,300,000
7.01.01.2.0305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,300,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4,200,000
7.01.01.2.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	1,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	4,200,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	82,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	77,680,000
7.01.01.2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000
7.01.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000
7.01.01.2.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000
7.01.01.2.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000
7.01.01.2.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000

7.01.01.2.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000
7.01.01.2.0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,000,000
7.01.01.2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,680,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	30,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	41,385,000
7.01.01.2.0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
7.01.01.2.0705	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20,000,000
7.01.01.2.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21,385,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	323,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	386,395,000
7.01.01.2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000
7.01.01.2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16,815,000
7.01.01.2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366,580,000

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	123,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	168,340,000
7.01.01.2.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	20,000,000
7.01.01.2.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000
7.01.01.2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	145,340,000
	Jumlah 1				5,360,930,061	Jumlah 1				6,050,485,647
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Cikancung	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	79 Point	430,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Cikancung	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	79 Point	367,200,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000
7.01.02.2.0101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	20,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	70,000,000

7.01.02.2.0201	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000
7.01.02.2.0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	60,000,000
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	15,000,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	15,000,000
7.01.02.2.0301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	385,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	272,200,000
7.01.02.2.0403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	385,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	272,200,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cikancung	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cikancung	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100 %	67,516,177
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	40,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	40,000,000

7.01.03.2.0103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	45,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	18,906,177
7.01.03.2.0302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga K emasyara kat an	15,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5,770,000
7.01.03.2.0304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	6,480,000
7.01.03.2.0305	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,656,177
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	15,000,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	8,610,000
7.01.03.2.0607	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	15,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	8,610,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Cikancung	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	45,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Cikancung	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	45,000,000

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	15,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	15,000,000
7.01.04.2.0102	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	30,000,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	30,000,000
7.01.04.2.0201	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Cikancung	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	66,550,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Cikancung	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	57,100,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	66,550,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	57,100,000

7.01.05.2.0102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000
7.01.05.2.0104	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	25,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	15,550,000
7.01.05.2.0108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31,550,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31,550,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Cikancung	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	80,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Cikancung	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	51,284,700
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	80,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	51,284,700
7.01.06.2.0102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7,160,000
7.01.06.2.0103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7,090,000

7.01.06.2.0107	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0
7.01.06.2.0109	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25,000,000
7.01.06.2.0118	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,034,700
	Jumlah 2				721,550,000	Jumlah 2				588,100,877
	Jumlah Total				6,082,480,061	Jumlah Total				6,638,586,524

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

TC.32

Usulan Program Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Kecamatan Cikancung

No	Prgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran		Catatan
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkanprioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Tabel 3.1

Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

Program Pembangunan Nasiona		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaanpenanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup			
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan social	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera“*.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Membangkitkan daya saing Daerah
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Cikancung menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Serta berpedoman kepada Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung



A. Tujuan

Tujuan Kecamatan Cikancung dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

   Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Adapun sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung untuk tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

Adapun target kinerja Kecamatan Cikancung Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Target Kinerja Kecamatan Cikancung Tahun 2026

Sebelum Reviu Tujuan Kecamatan	Setelah Reviu Tujuan Kecamatan	Sebelum Reviu Sasaran Kecamatan	Setelah Reviu Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya Akuntabiitas Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	1. Laju IKM	Nilai IKM	83 Point
2.Meningkatnya kualitas Pelayanan PublikSebelum Reviu Tujuan Kecamatan		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan				
		1. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa				

Sumber Perubahan Renstra Kecamatan Cikancung 2021-2026 dan hasil Keputusan internal Tim Penyusun Renja 2026

Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cikancung pada Tahun Anggaran 2026. Berikut ini :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Laju IKM			
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Nilai IKM			
1	Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Cikancung	Meningkatnya Kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** **2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah**			
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Cikancung	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Cikancung	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunya Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunya Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	

1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.8	Tersedianya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.9	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
1.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	

1.2.5	Tersedianya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan		
1.3.1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.2	Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.3	Terlaksanakanya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.4	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		
1.4.1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1.4.2	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianyan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
1.4.3	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	
1.4.4	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4.5	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	

	Undangan					Perundang-Undangan	
1.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
1.5.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.5.3	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	
1.5.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.5.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1.5.6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	
1.5.7	Tersedianya Bahan/ Material yang dibutuhkan	Tersedianyan bahan / material	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
1.5.8	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1.5.9	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.6	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.6.1	Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianyan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
1.6.2	Terpenuhinya kebutuhan	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang	

	Mebel					Disediakan	
1.6.3	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1.7	Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.7.1	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.7.2	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.7.3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.7.4	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.8	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
1.8.1	Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.8.2	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.3	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.4	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

	bangunan lainnya						
1.8.5	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
2.1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunya Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.1.2	Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan gunaMendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		
2.2.1	Terlaksananya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
2.2.2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

			Kecamatan				
2.3	Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.3.1	Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi/ sinergi dengan perangkat Dearah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.4.1	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
2.4.2	Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina			
3.1	Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3.1.2	Terciptanya harmonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Tersedianya dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan	

	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	di Wilayah Kerja Kecamatan			oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.1.3	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memilik Desa)		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		
3.2.1	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	
3.2.3	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.2.4	Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan	TerFasilitasinya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		
3.3.1	Memperkuat ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
3.3.2	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan sandang	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penguunaan dan pemanfaatan sandang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan	

	produksi dalam negeri	produksi dalam negeri	Produksi Dalam Negeri			dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
3.3.3	Meningkatkan Kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan layak huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
3.3.4	Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Pertumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
3.3.5	Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pertumbuhan Keluarga dalam Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.3.6	Menyiapkan keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
3.3.7	Menyiapkan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
4.1	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
4.1.1	Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.1.2	Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4.2	Terselenggaranya koordinasi penerepan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
4.2.1	Terselenggaranya Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			
5.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
5.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	

			Indonesia			Indonesia	
5.1.2	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional	
5.1.3	Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
5.1.4	Meningkatnya kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
5.1.5	Tertanganinya konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
5.1.6	Terselenggaranya Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
6.1	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang dibina		

6.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
6.1.2	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
6.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.4	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.5	Terakomodirnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
6.1.6	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	TerFasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6.1.7	Terjalinnya kerjasama antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
6.1.8	Terselenggaranya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
6.1.9	Tersusunnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terfasilitasinya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan	
6.1.10	Terselenggaranya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Cikancung secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cikancung Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pelayanan Masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikancung Tahun 2026 adalah 6 (Enam) program dengan 17 (Tiga belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan didalamnya.

2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikancung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cikancung, yang meliputi semua Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Cikancung dan juga Kantor Kecamatan Cikancung sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di Wilayah Kabupaten Bandung.

3) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 6.671.911.242 (Enam Miliyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rekapitulasi Program/Kegiatan Tahun 2026 berdasarkan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah – Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana/pagu indikatif tersaji dalam Tabel T-C 33

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN CIKANCUNG KAB. BANDUNG

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN CIKANCUNG						6,319,411,571							6,298,000,000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						6,319,411,571							6,298,000,000	
	7.01	KECAMATAN						6,319,411,571							6,298,000,000	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	-			60 Point 70 Point	5,648,934,371						60 Point 70 Point	5,723,000,000	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	-			77 point	30,400,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif,	Pegawai Kecamatan Cikancung	77 point	47,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

												inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,400,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung		5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen		Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

												Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen		Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan		Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Laporan	30,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

												birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Laporan	1,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				20 Data	5,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	20 Data	1,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	4,948,916,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi	Pegawai Kecamatan Cikancung	100 %	5,065,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

											pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bula n	4,939,416,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	300 Orang/bulan	5,050,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				2 Laporan	3,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Laporan	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.02.00 07	Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	4,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Laporan	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	-			100 Persen	2,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	100 Persen	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Pe	nyusunan Laporan Bar	ang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	-			100 Persen	15,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi	Pegawai Kecamatan Cikancung	100 Persen	15,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

												birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian	Dinas beserta Atribut	Kelengkapannya												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	15,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	50 Paket	15,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	141,263,371	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	100 Persen	94,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Kompon Listrik/Penerangan	en Instalasi Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Paket	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralata	n dan Perlengkapan K	antor												

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	90,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	4 Paket	50,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralata n Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2,500,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Paket	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Paket	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12,763,371	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Paket	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	12,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	3,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	2 Paket	3,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	12 Laporan	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai	Pegawai Kecamatan Cikancung	60 Laporan	10,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

											asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	39,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	100 Persen	10,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	39,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Pegawai Kecamatan Cikancung	4 Unit	10,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

											Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	419,400,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	100 Persen	269,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif,	Pegawai Kecamatan Cikancung	12 Laporan	5,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

											inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	12 Laporan	14,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	396,400,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Pegawai Kecamatan Cikancung	12 Laporan	250,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

											Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	-			80 Persen	52,955,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	80 Persen	218,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	40,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif,	Pegawai Kecamatan Cikancung	9 Unit	15,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

												inovatif dan dinamis				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cikancung	5 Unit	3,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,955,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cikancung	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	-			83.5 Point	382,997,200	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	280,000,000	

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	5,000,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	5,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-			100 %	5,000,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.02.2.03.00 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			100 %	362,997,200			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-	250,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina				8 Laporan	362,997,200	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat		250,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	142,480,000						-	95,000,000	

			Desa (LKD)												
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			100 %	40,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	52,480,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga K emasyarakat an	32,480,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													

			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	50,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.03.2.06.00 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan M						enerapkan Perila	ku Hidup Bersih dan Sehat							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	50,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	-			100 %	30,000,000						-		

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			100 %	20,000,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	20,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	-			100 %	35,000,000						-		

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	35,000,000			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-		KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat		20,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Bandung, Cikancung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		25,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

			Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Semua Kel/Desa							
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa Jumlah Desa Mandiri	-			100 Persen 2 Desa	80,000,000						-	115,000,000	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	-			100 %	80,000,000			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat	-	115,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.06.2.01.00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Masyarakat		20,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG

											Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat		20,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat		0	KECAMATAN CIKANCUNG

											Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat			KECAMATAN CIKANCUNG

												Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat		30,000,000	KECAMATAN CIKANCUNG
	J U M L A H							6,319,411,571							6,298,000,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cikancung Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel IV.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

Kecamatan Cikancung

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	7.01	KECAMATAN	Kecamatan Cikancung	Nilai Laju IKM	0,24 Point	**6,319,411,571.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	Disesuaikan dengan kebutuhan, Verifikasi BAPERIDA
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikancung	Nilai IRB Nilai IMR	60 Point 70 Point	**5,648,934,371.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Nilai Akip	77 Point	**30,400,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0108	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0109	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Cikancung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	**4,948,916,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	
		7.01.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,939,416,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAU	
		7.01.01.2.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2,300,000		
		7.01.01.2.0305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4,200,000		
		7.01.01.2.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	77,680,000		

		7.01.01.2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0607	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0705	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikancung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	21,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	386,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	366,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	145,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,648,934,371.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Cikancung	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	79 Point	382,997,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.0101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.0201	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.0301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	272,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.02.2.0403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	272,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cikancung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100 %	67,516,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.0103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	18,906,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.0302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.0304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	6,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.03.2.0305	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,656,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	8,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.03.2.0607	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	8,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Cikancung	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.04.2.0102	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04.2.0201	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Cikancung	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	57,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cikancung	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	57,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.05.2.0102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05.2.0104	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	15,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.05.2.0108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Cikancung	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	100 %	51,284,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	**80,000,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.0102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.06.2.0103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.0106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.0107	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.0109	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.0118	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikancung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Cikancung maupun nasional. Rencana awal ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergi

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Cikancung dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

CAMAT CIKANCUNG

ttd

SUDRAJAT

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA